Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 3 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

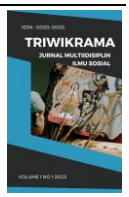

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN LAHAN TIDAK PRODUKTIF MELALUI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA CARUY KECAMATAN CIPARI KABUPATEN CILACAP

Hafid Amroni[1], Agus Nurulsyam Suparman[2], Aditiyawarman[3]
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available online Juli 2026

Email:
hafidamroni@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author.

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Lahan Tidak Produktif Melalui Program Ketahanan Pangan Di Desa Caruy Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap belum optimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Strategi Pemerintah Desa Caruy dalam memanfaatkan lahan tidak produktif melalui program ketahanan pangan. Teory yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teory Sedarmayanti (2023:112) terdapat 4 elemen yaitu; Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, evaluasi dan Pengendalian.Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data Obsevasi, Wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Strategi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan lahan tidak produktif melalui program ketahanan pangan di Desa Caruy Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap sudah berjalan baik tetapi ada yang belum berjalan secara optimal dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa pada dimensi implementasi strategi dengan indikator Pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan pemanfaatan lahan tidak produktif melalui program ketahanan pangan belum berjalan optimal. Hambatan yang muncul adalah bantuan yang diberikan masih kurang dan belum mencakup semua kebutuhan petani, anggaran belum dilakukan secara rutin karena masih menyesuaikan kondisi dan priorotas pembangunan lainnya, seiring berkurangnya dana desa sehingga sulit membaginya, anggaran yang tersedia belum mencukupi kebutuhan di lapangan, banyak kebutuhan pembangunan lainnya sehingga kegiatan tersebut belum menjadi fokus utama, anggaran untuk kegiatan ini masih terbatas, bantuan seperti bibit dan pupuk masih kurang sehingga pengelolaan lahan belum maksimal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mengusahakan penambahan bantuan pertanian secara bertahap sesuai kemampuan anggaran desa. Menyusun anggaran secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan desa. Mencari sumber pendanaan lain baik dari banpus atau banprov. Memprioritaskan pendanaan bagi lahan yang paling membutuhkan. Menyisihkan sebagian dana desa untuk mendukung kegiatan pengelolaan lahan. Membahas kebutuhan anggaran melalui musdes agar mendapat tambahan dukungan. Mengajukan bantuan tambahan bibit dan pupuk kepada pemerintah.

Kata Kunci: strategi, pemerintah desa, lahan tidak produktif, program ketahanan pangan.

Abstract. *This research is motivated by the fact that the Village Government's strategy for utilizing unproductive land through the food security program in Caruy Village, Cipari District, Cilacap Regency, has not yet been optimal. The study aims to understand the strategy employed by the Caruy Village Government in utilizing unproductive land via this food security program.The study utilizes the theory proposed by Sedarmayanti (2023:112), which comprises four elements: environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation, and evaluation and control.A qualitative research method was employed, utilizing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation.The research concludes that while the Village Government's strategy for utilizing unproductive land through the food security program in Caruy Village, Cipari District, Cilacap Regency, is generally functioning well, certain aspects are not yet optimal. This is evidenced by findings regarding the strategy implementation dimension—specifically the indicator concerning the village government's allocation of funds to support unproductive land utilization—which has not proceeded optimally. Obstacles identified include: insufficient assistance that fails to cover all farmers' needs; irregular budgeting due to the need to adjust to conditions and other development priorities (compounded by shrinking village funds, making allocation difficult); available funds falling short of field requirements; competing development needs preventing the activity from becoming a primary focus; limited budgets for the activity; and a lack of inputs such as seeds and fertilizer, hindering maximum land management. Efforts to overcome these obstacles include: gradually increasing agricultural assistance in line with the village's budgetary capacity;*

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 3 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

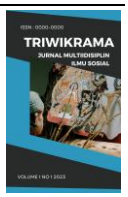

*formulating budgets incrementally based on needs and capacity; seeking alternative funding sources from central or provincial government grants; prioritizing funding for the land most in need; allocating a portion of village funds to support land management activities; discussing budgetary needs during village deliberations (*musdes*) to secure additional support; and requesting additional assistance in the form of seeds and fertilizer from the government.*

***Keywords**: strategy, village government, unproductive land, food security program.*

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara agraris yang dimana hampir semua daerah mampu membuka lahan pertanian sebagai tempat dalam bercocok tanam untuk semua jenis produk pertanian, hal ini tentunya membuat sektor pertanian di indonesia ditumbuhi oleh berbagai jenis produk unggulan pertanian dimana menghasilkan produk pangan (Rumawas dkk., 2021). Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan gizi.

Ketahanan pangan merupakan pilar utama dalam menjamin stabilitas dan kesejahteraan suatu bangsa. Dalam konteks global, target Sustainable Development Goals (SDGs) butir kedua, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi, menegaskan pentingnya sektor pangan sebagai prioritas utama pembangunan. Secara nasional, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal 1 angka 17 yang mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau bagi seluruh Masyarakat,, hal ini sesuai dengan peraturan daerah kabupaten cilacap Nomor 9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketahanan pangan pasal 1 dan pasal 2. Idealnya, setiap wilayah, termasuk desa, harus mampu mengoptimalkan semua sumber daya agraria yang dimiliki, terutama lahan, untuk mencapai kemandirian pangan.

Di tingkat lokal, peran Pemerintah Desa sangat sentral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa memiliki kewenangan penuh untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan, termasuk pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam lokal. Program ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama yang dapat dibiayai oleh Dana Desa, menunjukkan adanya dukungan regulasi yang kuat bagi desa untuk berinovasi dalam mengelola ketersediaan pangan mereka.Meskipun terdapat mandat

kuat untuk optimalisasi lahan dan dukungan regulasi, kenyataan di lapangan sering menunjukkan adanya kesenjangan. Fenomena lahan tidak produktif, merupakan masalah yang umum terjadi di banyak daerah pedesaan. Lahan-lahan ini bisa berupa lahan kering, bekas sawah tadah hujan yang ditinggalkan karena minimnya irigasi, atau tanah desa yang kurang optimal. Kondisi ini secara langsung menghambat potensi produksi pangan lokal.

Desa Caruy merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian berbasis lahan persawahan yang cukup luas. Secara geografis, desa ini memiliki luas wilayah sebesar 384,29 ha, di mana sebagian besar wilayahnya berupa lahan persawahan yang mencapai luas 195,69 ha. Lahan persawahan tersebut secara keseluruhan ditanami tanaman padi. Dari total luas tersebut, sekitar 178,89 ha merupakan sawah yang telah produktif dan dimanfaatkan secara optimal, sementara masih terdapat 16,8 ha yang belum memberikan hasil maksimal. Lahan yang belum optimal tersebut merupakan aset desa yang berpeluang untuk dimanfaatkan sebagai aset pendukung ketahanan pangan, serta menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Selain itu lahan sawah bengkok yang termasuk aset desa juga

dapat dikembangkan untuk pertanian agar membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Strategi pada dasarnya merupakan suatu rencana atau langkah terarah yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Dengan demikian, strategi pemerintah desa caruy menjadi sangat penting dalam memanfaatkan lahan tidak produktif untuk meningkatkan ketahanan pangan.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Strategi

Menurut Ahmad (2020:2) berpendapat bahwa: "strategi adalah langkah langkah yang sistematis dalam melakukan rencana secara menyeluruh (makro) dan berjangka panjang dalam mencapai tujuan". Menurut Ahmad (2020:2) menyatakan bahwa Strategi dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam rangka rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan". Hamim, (2019: 73) menyatakan bahwa Strategi mencerminkan kesadaran organisasi mengenai bagaimana, kapan, dan dimana ia harus bersaing; melawan siapa, dan untuk maksud apa. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing.

Selanjutnya menurut Siagian (2012:17) menyatakan bahwa Strategi adalah rencana berskala besar yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan. Kemudian menurut Amirullah (2015: 5), menyatakan bahwa Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keungggulan strategi organisasi dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang, untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Strategi dipahami bukan hanya sebagai berbagai cara untuk mencapai tujuan melainkan mencakup pula penentuan berbagai tujuan itu sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu proses rencana pimpinan pucuk yang befokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut di capai dan secara sederhana dapat dirumuskan sebagai tindakan yang bersifat ingkramental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan.

B. Pemerintah Desa

Secara yuridis, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yusnani Hasyimzoem (2017:93) menyatakan bahwa Pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa. Selanjutnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal langka Tentang Desa menyatakan "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa".

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal langka 2 Tentang Desa menyatakan: "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urasan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dipercayakan dengan tanggung jawab yang terkait dengan administrasi desa, menyelenggarakan pembangunan, dan penyediaan layanan publik kepada masyarakat yang tinggal di desa. Definisi pemerintahan desa dapat menunjukkan variasi berdasarkan perspektif dan teori yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. Namun demikian, pada dasarnya, pemerintah desa merupakan entitas yang bertanggung jawab atas organisasi dan pengelolaan urusan pemerintahan di tingkat desa, dengan tujuan menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

C. Lahan Tidak Produktif

Lahan tidak produktif, yang umumnya dipahami untuk menunjukkan wilayah geografis tertentu yang ditandai dengan kemampuan yang berkurang secara signifikan untuk mempertahankan praktik pertanian atau memfasilitasi produksi biomassa dengan cara yang dapat dianggap berkelanjutan dari waktu ke waktu, merupakan perhatian penting dalam bidang pengelolaan lahan dan ilmu lingkungan. Konsep khusus ini sering dikaitkan dengan fenomena degradasi lahan, suatu proses di mana produktivitas tanah yang melekat mengalami penurunan yang parah, yang dapat diakibatkan oleh berbagai faktor termasuk perubahan lingkungan alam, aktivitas antropogenik, atau interaksi kompleks antara pengaruh alam dan manusia yang disebabkan. Dengan demikian lahan tidak produktif dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis utama diantaranya sebagai berikut : Menurut Poerwowidodo (Sersermudi dkk, 2022:2) menyatakan bahwa Lahan kritis adalah suatu keadaan lahan yang terbuka atau tertutupi semak belukar, sebagai akibat dari solum tanah yang tipis dengan batuan bermunculan dipermukaan tanah akibat tererosi berat dan produktivitasnya rendah. Menurut Yuwono (Adil et al., 2025:12) menyatakan bahwa lahan marginal dapat diartikan sebagai lahan yang memiliki mutu rendah karena memiliki beberapa faktor pembatas jika digunakan untuk suatu keperluan tertentu.

D. Ketahanan Pangan

Kebijakan ketahanan pangan di desa, merujuk pada upaya pencapaian SDGs Desa utamanya pada terwujudnya Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai kebutuhan, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, dan Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Menurut Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 82 tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa dinyatakan bahwa Ketahanan pangan di Desa adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat desa sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai strategi pemerintah desa dalam pemanfaatan lahan tidak produktif melalui program ketahanan pangan di desa caruy kecamatan cipari kabupaen cilacap menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai fenomena

strategi pemerintah desa dalam pemanfaatan lahan tidak produktif melalui program ketahanan pangan berdasarkan kondisi empiris di lapangan serta pengalaman para aktor yang terlibat secara langsung.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Caruy Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya strategi pemerintah desa dalam pemanfaatan lahan tidak produktif melalui program ketahanan pangan di desa caruy kecamatan cipari kabupaen cilaca yang belum optimal.

Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan strategi pemerintah desa dalam pemanfaatan lahan tidak produktif melalui program ketahanan pangan. Informan terdiri atas Kepala Desa Caruy, Kaur umum dan perencanaan, Ketua BPD dan Anggota BPD Ketua LPM dan Anggota LPM, Ketua Gabungan Kelompok Tani

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung proses strategi pemerintah desa dalam pemanfaatan lahan tidak produktif melalui program ketahanan pangan. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana strategi pemerintah desa dalam pemanfaatan lahan tidak produktif melalui program ketahanan pangan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen lahan asset desa, regulasi, laporan administrasi, serta arsip pendukung lainnya.

Teknik analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check guna memastikan keabsahan data penelitian sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengamatan Lingkungan

1. Pemerintah desa memperkuat sistem organisasi untuk mengoptimalkan kinerja.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti menganalisis bahwa indikator Pemerintah Desa memperkuat sistem organisasi untuk mengoptimalkan kinerja telah berjalan dengan optimal. Hal ini didukung oleh adanya pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang baik, komunikasi yang efektif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi antar lembaga desa dalam mendukung pemanfaatan lahan tidak produktif. Dengan demikian, pelaksanaan struktur organisasi telah mengarah pada pencapaian tujuan organisasi desa secara lebih efektif dan efisien sehingga sesuai dengan teori Sedarmayanti (2023:112) yang menyatakan bahwa sistem organisasi merupakan suatu keyakinan, sikap, dan nilai yang dimiliki oleh suatu organisasi.

2. Pemerintah Desa dapat mengatasi kelemahan sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menganalisis bahwa indikator Pemerintah Desa mempunyai upaya dalam mengatasi kelemahan sumber daya manusia telah berjalan dengan optimal. Hal ini didukung oleh adanya pembinaan, pelatihan, pendampingan, evaluasi kinerja, pemberian motivasi, serta kerja sama antarperangkat desa dan lembaga desa dalam meningkatkan kompetensi aparatur. Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Dengan demikian, kondisi tersebut telah sesuai dengan teori Sedarmayanti (2023:112) yang menyatakan bahwa kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalan satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas dalam suatu organisasi.

3. **Pemerintah Desa memanfaatkan peluang untuk meningkatkan produktifitas lahan.**

   Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menganalisis bahwa indikator Pemerintah Desa memanfaatkan peluang untuk meningkatkan produktivitas lahan telah berjalan dengan optimal. Hal ini didukung oleh adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa, kelompok tani, penyuluh pertanian, serta pemanfaatan berbagai program bantuan dari pemerintah. Selain itu, pemerintah desa juga melakukan perencanaan berdasarkan kondisi lahan dan potensi yang dimiliki sehingga peluang yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil pertanian. Dengan demikian, kondisi tersebut telah sesuai dengan teori Sedarmayanti (2023:112) yang menyatakan bahwa peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu organisasi, kecenderungan utama merupakan salah satu sumber peluang.

4. **Pemerintah desa menghadapi ancaman kondisi lahan yang sering terdampak banjir.**

   Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menganalisis bahwa indikator Pemerintah Desa menghadapi ancaman kondisi lahan yang sering terdampak banjir telah berjalan dengan optimal. Hal ini didukung oleh adanya berbagai strategi mitigasi yang dilakukan, seperti perbaikan infrastruktur pengendalian banjir, pemetaan lahan rawan banjir, normalisasi saluran air, penggunaan bibit yang lebih tahan terhadap genangan, serta penyesuaian pola tanam berdasarkan kondisi lahan. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berusaha mengurangi dampak ancaman banjir terhadap produktivitas lahan melalui langkah-langkah yang terencana dan melibatkan berbagai pihak. Dengan demikian, kondisi tersebut telah sesuai dengan teori Sedarmayanti (2023:112) yang menyatakan bahwa ancaman merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu organisasi, ancaman merupakan penghalang utama bagi organisasi dalam mencapai tujuan.

B. Perumusan Strategi

1. **Pemerintah desa memanfaatkan peluang untuk mencapai misi pemanfaatan lahan tidak produktif melalui program ketahanana pangan.**

   Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menganalisis bahwa indikator Pemerintah Desa memanfaatkan peluang untuk mencapai misi pemanfaatan lahan tidak produktif melalui program ketahanan pangan telah berjalan dengan optimal. Hal ini didukung oleh adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa, kelompok tani, dan masyarakat, pemanfaatan program bantuan dari pemerintah, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk mendukung keberhasilan program ketahanan pangan melalui pengelolaan lahan tidak produktif.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 3 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Dengan demikian, kondisi tersebut telah sesuai dengan teori Sedarmayanti (2023:112) yang menyatakan bahwa misi merupakan rumusan umum mengenai Upaya dan langkah-langkah konkret yang dilaksanakan untuk mewujudkan rujuan yang diinginkan.

2. **Pemerintah desa merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengoptimalkan kinerja.**

   Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menganalisis bahwa indikator Pemerintah Desa merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengoptimalkan kinerja telah berjalan dengan optimal. Hal ini didukung oleh adanya analisis kebutuhan masyarakat, penyusunan strategi yang terencana, koordinasi dan komunikasi yang baik antarperangkat desa dan lembaga desa, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kondisi tersebut telah sesuai dengan teori Sedarmayanti (2023:112) yang menyatakan bahwa perumusan kebijakan merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah.

3. **Pemerintah desa melakukan pengembangan strategi pemanfaatan lahan tidak produktif.**

   Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menganalisis bahwa indikator Pemerintah Desa melakukan pengembangan strategi pemanfaatan lahan tidak produktif telah berjalan dengan optimal. Hal tersebut ditunjukkan melalui adanya perencanaan strategi jangka panjang, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, penguatan kerja sama dengan kelompok tani, pemanfaatan bantuan dari pemerintah, pemberian pendampingan kepada masyarakat, serta dukungan terhadap penerapan teknologi pertanian. Berbagai strategi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program dalam jangka pendek, tetapi juga berupaya menciptakan keberlanjutan pemanfaatan lahan tidak produktif agar mampu meningkatkan hasil pertanian dan mendukung ketahanan pangan desa. Dengan demikian, kondisi tersebut telah sesuai dengan teori Sedarmayanti (2023:112) yang menyatakan bahwa pengembangan strategi merupakan usaha untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan yang dikehendaki organisasi.

C. Implementasi Strategi

1. **Pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan pemanfaatan lahan tidak produktif melalui program ketahanan pangan.**

   Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menganalisis bahwa indikator Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan pemanfaatan lahan tidak produktif melalui program ketahanan pangan belum berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh bantuan yang diberikan masih kurang dan belum mencakup semua kebutuhan petani, anggaran belum dilakukan secara rutin karena masih menyesuaikan kondisi dan priorotas pembangunan lainnya, seiring berkurangnya dana desa sehingga sulit membaginya, anggaran yang tersedia belum mencukupi kebutuhan di lapangan, banyak kebutuhan pembangunan lainnya sehingga kegiatan tersebut belum menjadi fokus utama, anggaran untuk kegiatan ini masih terbatas, bantuan seperti bibit dan pupuk masih kurang sehingga pengelolaan lahan belum maksimal.

Adapun upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Desa untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan mengusahakan penambahan bantuan pertanian secara bertahap sesuai kemampuan anggaran desa. Menyusun anggaran secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan desa. Mencari sumber pendanaan lain baik dari banpus atau banprov. Memprioritaskan pendanaan bagi lahan yang paling membutuhkan. Menyisihkan sebagian dana desa untuk mendukung kegiatan pengelolaan lahan. Membahas kebutuhan anggaran melalui musdes agar mendapat tambahan dukungan. Mengajukan bantuan tambahan bibit dan pupuk kepada pemerintah.

Sehingga dengan upaya yang dilakukan bahwa dimensi implementasi strategi dalam indikator Pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan pemanfaatan lahan tidak produktif melalui program ketahanan pangan akan berjalan optimal dan sesuai dengan Teori dari Sendarmayanti (2023:112) yang menyatakan bahwa anggaran merupakan program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan.

2. **Pemerintah desa mencapai strandarisasi prodsedur yang efisien untuk mempermudah pemanfaatan lahan tidak produktif.**

   Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menganalisis bahwa indikator Pemerintah Desa mencapai standarisasi prosedur yang efisien untuk mempermudah pemanfaatan lahan tidak produktif telah berjalan dengan optimal. Hal tersebut ditunjukkan melalui adanya penyusunan prosedur yang lebih jelas, peningkatan sarana dan prasarana, pelaksanaan pemantauan secara berkala, pemberian pelatihan kepada aparat desa dan petani, serta pembagian tugas yang terarah. Standarisasi prosedur tersebut membantu menciptakan pelaksanaan program yang lebih efektif, tertib, dan mudah dipahami oleh masyarakat sehingga tujuan pemanfaatan lahan tidak produktif dapat tercapai dengan lebih baik. Dengan demikian, kondisi tersebut telah sesuai dengan teori Sedarmayanti (2023:112) yang menyatakan bahwa prosedur merupakan sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan.

3. **Pemerintah desa mewujudka program-program inovatif untuk meningkatkan produktifitas lahan.**

   Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menganalisis bahwa indikator Pemerintah Desa mewujudkan program-program inovatif untuk meningkatkan produktivitas lahan telah berjalan dengan optimal. Hal tersebut didukung oleh adanya berbagai inovasi yang diterapkan, seperti modernisasi pertanian, pemanfaatan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana, penggunaan bibit unggul, peningkatan kapasitas petani melalui penyuluhan, serta penanganan permasalahan banjir melalui perbaikan infrastruktur pendukung. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa terus berinovasi dalam meningkatkan produktivitas lahan agar program ketahanan pangan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan demikian, kondisi tersebut telah sesuai dengan teori Sedarmayanti (2023:112) yang menyatakan bahwa program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 3 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

D. Evaluasi dan Pengendalian

1. **Pemerintah desa memantau kinerja untuk memastikan efektifitas dalam pemanfaatan lahan tidak produktif.**

   Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menganalisis bahwa indikator Pemerintah Desa memantau kinerja untuk memastikan efektivitas dalam pemanfaatan lahan tidak produktif telah berjalan dengan optimal. Hal ini didukung oleh adanya pemantauan langsung ke lapangan, evaluasi berkala, pelaporan hasil panen, koordinasi dengan perangkat desa dan kelompok tani, serta pemanfaatan data dan masukan dari masyarakat sebagai dasar evaluasi program. Melalui pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan, pemerintah desa dapat mengetahui tingkat keberhasilan program sekaligus mengambil langkah perbaikan apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, kondisi tersebut telah sesuai dengan teori Sedarmayanti (2023:112) yang menyatakan bahwa pemantauan kinerja merupakan hal yang memengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan.
2. **Pemerintah desa membuat laporan hasil kerja untuk pembandingan antara efektifitas kegiatan dan tujuan yang di inginkan.**

   Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menganalisis bahwa indikator Pemerintah Desa membuat laporan hasil kerja untuk pembandingan antara efektivitas kegiatan dan tujuan yang diinginkan telah berjalan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penyusunan laporan yang didasarkan pada data yang akurat, hasil pemantauan lapangan, serta perbandingan antara target dan capaian program. Laporan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai alat evaluasi dalam mengidentifikasi keberhasilan maupun kendala pelaksanaan program sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan kegiatan pada periode berikutnya. Dengan demikian, kondisi tersebut telah sesuai dengan teori Sedarmayanti (2023:112) yang menyatakan bahwa ukuran yang mengukur program pelayanan publik di lembaga atau instansi pemerintah berdasarkan input, proses produksi, hasil dan produktivitas.
3. **Pemerintah desa melakukan perbaikan terhadap hasil pemanfaatan lahan tidak produktif supaya hasilnya lebih baik.**

   Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menganalisis bahwa indikator Pemerintah Desa melakukan perbaikan terhadap hasil pemanfaatan lahan tidak produktif supaya hasilnya lebih baik telah berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program, identifikasi berbagai kendala di lapangan, peningkatan koordinasi dengan kelompok tani dan masyarakat, serta pemberian pendampingan dan perbaikan sarana pendukung. Selain itu, hasil evaluasi dijadikan sebagai dasar dalam menyusun langkah-langkah perbaikan yang dibahas melalui Musyawarah Desa sehingga program yang dilaksanakan dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kondisi tersebut telah sesuai dengan teori Sedarmayanti (2023:112) yang menyatakan bahwa melakukan evaluasi atau tindakan lanjutan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi atau capaian dari suatu pekerjaan, proses maupun sistem agar lebih optimal.

5. KESIMPULAN

Strategi pemerintah Desa dalam pemanfaatan lahan tidak produktif melalui program ketahanan pangan di desa caruy kecamatan cipari kabupaten cilacap belum optimal, hal tersebut dibuktikan dengan belum optimalnya dalam indikator Pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan pemanfaatan lahan tidak produktif melalui program ketahanan pangan yang disebabkan karena belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan petani, masih menyesuaikan kondisi dan prioritas pembangunan lainnya.

Adapun ditemui hambatan yang muncul dalam strategi pemanfaatan lahan tidak produktif melalui program ketahanan pangan di desa caruy kecamatan cipari kabupaten cilacap berdasarkan hasil wawancara pada dimensi pengamatan lingkungan dalam indikator Pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan pemanfaatan lahan tidak produktif melalui program ketahanan pangan belum optimal, diantaranya yaitu bantuan yang diberikan masih kurang dan belum mencakup semua kebutuhan petani, anggaran belum dilakukan secara rutin karena masih menyesuaikan kondisi dan priorotas pembangunan lainnya, seiring berkurangnya dana desa sehingga sulit membaginya, anggaran yang tersedia belum mencukupi kebutuhan di lapangan, banyak kebutuhan pembangunan lainnya sehingga kegiatan tersebut belum menjadi fokus utama, anggaran untuk kegiatan ini masih terbatas, bantuan seperti bibit dan pupuk masih kurang sehingga pengelolaan lahan belum maksimal.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah mengusahakan penambahan bantuan pertanian secara bertahap sesuai kemampuan anggaran desa. Menyusun anggaran secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan desa. Mencari sumber pendanaan lain baik dari banpus atau banprov. Memprioritaskan pendanaan bagi lahan yang paling membutuhkan. Menyisihkan sebagian dana desa untuk mendukung kegiatan pengelolaan lahan. Membahas kebutuhan anggaran melalui musdes agar mendapat tambahan dukungan. Mengajukan bantuan tambahan bibit dan pupuk kepada pemerintah.

DAFTAR REFRENSI

Ahmad. 2020. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan Pertanian Berkelanjutan*. Jakarta: Pustaka Mitra Bangsa.

Amirullah. 2015. *Pengantar Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Graha limu.

Hamim. 2019. *Pemberdayaan Petani dan Ketahanan Pangan Lokal*. Malang: UB Press.

Salusu, 2016. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit,* Jakarta: Grasindo

Sedarmayanti (2023). *Manajemen Strategi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Siagian, S. P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Revika Aditama.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Umar, H. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers (PT Rajagrafindo Persada).

Walidin, W. A. K., Saifullah, & Tabrani, Z. A. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.

Widjaja, H. 2009. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yusnani Hasyimzoem, dkk. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan Di Desa.

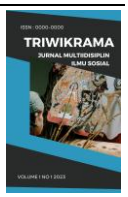

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentangtata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

Permen No. P.89/Menlhk/Setjen/Kum. 1/11/2016 Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Ri No.37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air.